otonomi

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Volume 1 Nomor 1 April 2006

Penataan Organisasi Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Oleh: *Muhammad Idris dan Burhanuddin*

Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia

Oleh: *Muhlis Madani*

Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Perkotaan : Kajian Pemanfaatan Dana IDT di Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Oleh: *Djuliati Saleh*

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat di Sulawesi Selatan

Oleh: *Fatmawati*

Perspektif Budaya Birokrasi di Indonesia

Oleh: *Abdul Mahsyar*

Analisis Faktor Penyebab, Karakteristik dan Strategi Penyelesaian
Konflik di Maluku Utara

Oleh: *Jaelan Usman*

Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Melalui Pendidikan dan
Pelatihan

Oleh: *H.A. Fahsar Padjalangi*

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kantor
Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar

Oleh: *Siti Nurmaeta*

Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Desa
Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Selayar

Oleh: *A. Nuraeni Aksa*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Otonomi
Jurnal
Ilmu-Ilmu Sosial

Volume 1

Nomor 1

Halaman
1-124

Makassar
April 2006

ISSN
1907-3410

otonomi

ISSN : 1907-3410 ■

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Volume 1 Nomor 1 April 2006

Otonomi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial adalah wadah informasi bidang ilmu-ilmu sosial berupa artikel hasil penelitian ilmu sosial, studi kepustakaan maupun tulisan ilmiah ilmu sosial lainnya. Terbit pertama kali pada Bulan April 2006 dengan frekuensi terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember.

Penasihat : Drs. Irwan Akib, M.Pd. (Rektor Unismuh Makassar)
Drs. Muhlis Madani, M.Si. (Dekan Fisipol Unismuh)

Ketua Penyunting : Drs. Abdul Mahsyar, M.Si.]
Wkl. Ket.Penyunting : Syamsir Rahim, S.Sos. M.Si.]
Penyunting Ahli : Prof. DR. H.M. Tahir Kasnawi, M.S. (Universitas Hasanuddin)
DR. Zainuddin MM., M.Si., S.Psi. (Univ. Muhammadiyah Jember)
DR. Rahmat, M.Si. (Universitas Hasanuddin)
DR. Rahman Rahim, M.Si. (Unismuh Makassar)

Penyunting Pelaksana : Drs. Muhammad Idris, M.Si.
(Managing Editor) : Drs. Muhammad Tahir, M.Si.
Drs. Djaelan Usman, M.Si.
Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si.
Dra. Hj. Fatmawati, M.Si.

Distribusi dan Pemasaran: Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si.
Kesekretariatan : Agus Hidayat, S.E.
Sabria

Penerbit dan Alamat Redaksi:

Penerbit: Otonomi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dekan: Drs. Muhlis Madani, M.Si.

Alamat : Kantor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Gedung F).
Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin Km.7
Makassar 90221. Telepon 0411-866972 Psw.25. Fax: 0411-865588
E-mail: mahsyar68@yahoo.com

Naskah dikirim ke redaksi dibuat dalam format MSWord print out disertai CD/disket (Petunjuk penulisan naskah lihat pada halaman kulit belakang)

otonomi

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial

Volume 1 Nomor 1 April 2006

Daftar Isi
Dari Redaksi

Penataan Organisasi Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (1-15)
Oleh: Muhammad Idris dan Burhanuddin

Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia (17-26)
Oleh: Muhlis Madani

Pendekatan Dinamika Kelompok dalam Pemberdayaan Masyarakat
Miskin Perkotaan : Kajian Pemanfaatan Dana IDT di Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar (27-40)
Oleh: Djulianti Saleh

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat di Sulawesi Selatan (41-53)
Oleh: Fatmawati

Perspektif Budaya Birokrasi di Indonesia (55-66)
Oleh: Abdul Mahsyar

Analisis Faktor Penyebab, Karakteristik dan Strategi Penyelesaian
Konflik di Maluku Utara (67-82)
Oleh : Jaelan Usman

Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Melalui Pendidikan dan Pelatihan
(83-95)
Oleh: H.A. Fahsar Padjalangi

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kantor
Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar (97-108)
Oleh: Siti Nurmaeta

Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Desa Pamatata Kecamatan
Bontomatene Kabupaten Selayar (109-124)
Oleh: A. Nuraeni Aksa

DARI REDAKSI

Assalamu'alaikum wr.wb.

Rasa syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan izinnya jualah sehingga **OTONOMI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial** ini dapat diterbitkan pada edisi perdana Bulan April 2006.

Penerbitan jurnal ini oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar tidak lain karena dorongan dari berbagai pihak baik dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga terutama dari para pengajar sebagai tuntutan masyarakat akademis yakni untuk menyediakan wadah bagi para dosen untuk mengaktualkan karya-karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya ilmiah lainnya untuk dipublikasikan.

Disadari sepenuhnya bahwa terbitan pada edisi perdana ini tema-tema yang diangkat masih bersifat umum sekalipun tetap berada dalam cakupan bidang ilmu-ilmu sosial. Namun untuk edisi yang akan datang akan diupayakan untuk mengangkat tema-tema khusus yang sifatnya aktual pada setiap edisi, hal ini dimaksudkan supaya pembaca dapat memperoleh informasi yang lebih tajam dan lengkap.

Semoga tulisan yang dimuat dalam edisi perdana ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca sebagai upaya untuk memperluas wawasan khususnya bidang ilmu-ilmu sosial. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan serta kritikan demi kesempurnaan jurnal ini di masa datang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Makassar, April 2006

Penyunting

IMPLIKASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Muhlis Madani

Dosen Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berimplikasi terhadap model penyelenggaraan pemerintahan dari structural efficiency model menjadi local democracy model.

Ada dua tujuan dikembangkannya otonomi daerah yaitu politik dan administratif. Untuk menjaga stabilitas politik dan upaya mencapai kemandirian peningkatan kehidupan bermasyarakat melalui pemanfaatan seluruh potensi daerah. Manfaatnya bergantung pada kemauan dan kemampuan aparatur daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana pembangunan secara tepat.

Dampak positif kebijakan pelaksanaan otonomi daerah adalah perkembangan proses demokrasi, partisipasi masyarakat, kreativitas dan inovasi, gairah birokrasi, peningkatan pengawasan, peningkatan peran DPRD, pemberian pelayanan umum, dan semangat membangun daerah yang tinggi. Sedangkan dampak negatifnya adalah beban masyarakat yang tinggi karena semangat peningkatan PAD, konflik kepentingan antar daerah, perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi, dan munculnya egoisme kedaerahan.

Kata Kunci: Implikasi, Kebijakan, Otonomi, Daerah.

Pendahuluan

Kehendak untuk melakukan reformasi dalam kehidupan politik nasional tampaknya sebuah kebutuhan yang tidak dapat dinafikan oleh siapa pun dalam situasi di mana masyarakat sedang mengalami euphoria terhadap perubahan. Usaha untuk melakukan perubahan politik yang secara serius dan sadar telah dilakukan oleh pemerintah, terbukti dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sesungguhnya dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah mengalami perubahan orientasi.

Kondisi ini telah berimplikasi terhadap perubahan penggunaan model penyelenggaraan pemerintahan, dimana model *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal telah ditinggalkan dan kemudian dianut *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, secara langsung berarti mengakui pluralitas yang terdapat di tiap-tiap daerah dengan kekayaan eksotiknya berupa nilai dan tradisi, kebutuhan dan potensi lokal yang dimiliki daerah masing-masing. Sebagai konsekuensinya, segala prestasi dan resiko berupa kegagalan yang timbul dalam pembangunan daerah menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen yang terdapat di daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan kondisi obyektif di lapangan, sejak pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi UU Otonomi Daerah ini, di mana kebijakan otonomi daerah dikembangkan untuk dua tujuan yaitu: *Petama*, tujuan politik dimaksudkan agar pemerintah daerah berfungsi sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pelayanan secara akuntabel dan melibatkan lokal. *Kedua*, untuk tujuan administratif dimaksudkan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah mampu menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokratisasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional dan perubahan pola sistem informasi global. Melalui

kebijakan otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi adalah wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.

Tujuan, Manfaat dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Otonomi Daerah

Adapun tujuan otonomi daerah, secara sederhana adalah: (1) Untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi adanya tuntutan akan lokalison atau usaha pemisahan dari ikatan NKRI. Dari sisi pelayanan memudahkan untuk pelayanan kepada publik; (2) Upaya untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan bermasyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan dan pemanfaatan seluruh sumber daya, asset dan potensi sumber daya yang ada di daerah.

Sedangkan manfaat dari otonomi daerah, yaitu : (1) Pemberian dan pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan aparatur daerah dalam mengelola dan mengorganisasikan sumber daya yang dimilikinya dalam proses pelaksanaan otonomi daerah, dan (2) agar pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan secara tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya secara agregat akan lebih optimal.

Namun demikian, agar tujuan dan manfaat otonomi daerah ini dapat terwujud, maka pemerintah daerah bersama dengan masyarakat perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dengan cermat, yaitu : (1) Kepala Daerah yang bertugas menjalankan hak, kewenangan dan kewajibannya serta bekerja sama dengan DPRD; (2) DPRD sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijakan daerah dan sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijakan daerah yang dijalankan oleh kepala daerah; (3) Kemampuan aparatur pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas SDM-nya, dan (4) Partisipasi aktif anggota masyarakat, (5) Keuangan daerah yang cukup memadai untuk membiayai pengaturan, pengelolaan dan pengurusan rumah tangga daerah; (6) Sarana dan prasarana yang memadai; (7) Organisasi dan manajemen yang baik; (8) Kemauan politik (*political will*) untuk melaksanakan otonomi daerah; (9) Perangkat kebijakan (Perda);

dan (10) Terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN (Abdul Malik & Nur'ain Lubis, 2003).

Isu-Isu Strategis Penataan Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah berimplikasi terhadap berbagai perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah ini, menurut Nur Achmad Affandi (Dewantoro, 2001) secara teoritis ada 6 (enam) elemen utama yang membentuk pemerintahan daerah, yaitu : (1) Adanya urusan otonomi daerah yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; (2) Adanya kelembagaan yang merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah; (3) Adanya personil (pegawai) yang bertugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga daerah; (4) Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; (5) Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (6) Adanya manajemen urusan otonomi yaitu penyelenggaraan otonomi daerah agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

Penataan haruslah bersifat terpadu dan menyeluruh, karena pendekatan yang dilakukan selama ini menghasilkan *outcomes* yang kurang optimal. Untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap reformasi, maka diperlukan berbagai pemikiran secara sistematis untuk dituangkan dalam suatu agenda penataan pemerintahan daerah. Tujuan utama dari penataan kewenangan (urusan otonomi), kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut adalah agar pemerintah daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara operasional, berbagai makna yang terkandung dalam konsep tersebut, yaitu : (1) pengertian ekonomis, terkandung makna bagaimana Pemda mampu menjalankan urusan otonomi daerah dengan berbagai pertimbangan ekonomis yaitu memilih dari berbagai alternatif terbaik

dari sudut total pembiayaan. Tujuan ekonomis ini akan memberikan citra hilangnya kesan pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam kegiatan rutin maupun pembangunan; (2) Pengertian efektif, terkandung makna bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemda dapat mencapai sasaran yang direncanakan. Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemda haruslah terukur dan ada standar yang jelas. Tujuan yang akan dicapai adalah bahwa Pemda menjadi peka dalam menentukan tujuan dan sasaran dari setiap urusan otonomi yang dilaksanakan. Adanya sasaran yang jelas akan menunjukkan sejauh mana Pemda dapat menangkap aspirasi dan mengartikulasikan tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) masyarakat daerah yang bersangkutan; (3) Pengertian efisien, bermakna bahwa output yang dihasilkan dari setiap penyelenggaraan urusan otonomi daerah tercapai dengan sumber daya (dana, pegawai, peralatan dan tata kerja, dan lain-lain) dalam menjalankan tugas pokoknya; dan (4) Pengertian akuntabel bermakna bahwa Pemda mengutamakan kepentingan warganya dengan jalan mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonominya kepada masyarakat melalui wakil-wakil rakyat dalam yurisdiksinya. Tujuan yang ingin dicapai adalah pendidikan politik masyarakat lokal yang pada gilirannya secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik yang baik dan mencegah terjadinya gerakan separatisme dalam masyarakat yang mungkin karena perbedaan etnis, agama, suku, bahasa, maupun tingkat ekonomi.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel dalam upaya penataan kelembagaan birokrasi pemerintah di daerah dalam era otonomi, maka bentuk penataan yang akan dilakukan haruslah mengacu pada tingkat yang bermuara pada pelayanan yang baik kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan secara adil dan demokratis.

Refleksi Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah

1. Beberapa Kesalahpahaman tentang Otonomi Daerah

Terdapat beberapa kesalahpahaman yang biasa muncul di berbagai kalangan/kelompok masyarakat, baik praktisi maupun politisi tentang kebijakan otonomi daerah ini, karena terbatasnya pemahaman umum tentang pemerintahan daerah ataupun karena argumentasi-argumentasi yang diajukan lebih merupakan argumentasi politik ketimbang argumentasi keilmuan. Menurut Afan Gaffar (Syaukani, H, 2002) bahwa kesalahpahaman masyarakat dalam

menpersepsikan tentang kebijakan otonomi daerah, disebabkan oleh: (1) Otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang, dengan ungkapan bahwa "*otonomi identik dengan otomoney*". (2) Daerah belum siap dan belum mampu, karena selama ini daerah sangat bergantung kepada Pusat dalam bidang keuangan. (3) dengan otonomi daerah maka Pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah, terutama dalam bidang keuangan. (4) dengan otonomi daerah dapat dilakukan apa saja, tanpa memperhatikan lagi norma-norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. (5) otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.

Kelima persepsi masyarakat tersebut, dianggap keliru merupakan yang menonjol dari berbagai pandangan tentang kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang tampaknya perlu diluruskan.

2. Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah

Menurut Syaukani, H., et.al., 2003) bahwa kemungkinan implikasi kebijakan otonomi daerah ke depan dapat berupa :

- a. Implikasi terhadap hubungan legislatif dan eksekutif, yang dapat bersifat positif dan negatif tergantung pada keadaan arah perkembangan masa depan bagaimana demokrasi kita akan mewujudkan dirinya dalam kehidupan politik nasional. Dimensi positif dari penguatan dan pemberdayaan terhadap DPRD, agar lebih aktif dalam merespon dan menangkap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan implikasi negatif dari pemberian hak yang sangat besar kepada DPRD, yaitu kemungkinan akan terjadinya "konflik" yang berkepanjangan antara Kepala Daerah dengan DPRD, apabila sejumlah faktor lainnya ikut mendukung seperti (1) gaya kepemimpinan Kepala Daerah sangat berbeda dengan Pimpinan DPRD, (2) latar belakang kepentingan antara pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah, (3) latar belakang pengalaman dalam berpolitik dan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat berbeda antara Kepala Daerah dengan Anggota DPRD.

- b. Implikasi terhadap keuangan daerah; dengan diberlakukannya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentu saja memberikan harapan yang sangat besar kepada daerah. Di mana proporsi daerah akan bertambah drastis yakni penerimaan PBB dengan pembagian untuk daerah 90% dan pusat 10%, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan untuk daerah 80% dan pusat 20%, pertambangan umum dan perikanan untuk daerah 80% dan pusat 20%, penerimaan minyak bumi untuk daerah 15% dan pusat 85% serta penerimaan gas alam untuk daerah 30% dan pusat 70%. Selain itu, Daerah membuka peluang untuk menemukan sumber pendapatan lain yang sah yang dilegitimasi melalui pembuatan Perda.
- c. Implikasi terhadap pengembangan dan pembinaan birokrasi lokal. Dalam konteks ini, daerah mempunyai kewenangan yang luas, khususnya propinsi, kabupaten dan kota untuk membuat perencanaan kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu tertentu, termasuk kewenangan untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini akan berimplikasi pada pola rekrutmen dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah mengingat potensi daerah berbeda antara satu dengan yang lainnya, maka perlu memperhatikan dimensi keadilan dan kesetaraan antara satu daerah dengan lainnya, jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial yang membawa akibat terhadap gejolak sosial dan politik di daerah.
- d. Implikasi terhadap dinamika politik lokal, dengan otonomi daerah sangat dimungkinkan akan tumbuhnya dinamika politik yang sangat tinggi di daerah yang harus dapat diantisipasi. Hal itu sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi di semua tingkatan masyarakat termasuk di tingkat lokal yang mendorong peningkatan terhadap akuntabilitas pejabat di daerah akan sangat tinggi. Meningkatnya kebebasan berpendapat, berserikat ataupun kebebasan pers dalam menyoroti berbagai perilaku pejabat pemerintahan di daerah. Selain itu. Telah munculnya berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) yang merupakan *sparring partner* pemerintah daerah dan partai politik.

Apabila dilihat dari hasil kajian yang dilakukan oleh Abdul Malik & Nur'ain Lubis (2003), tampak bahwa secara umum dampak sosial dari kebijakan pelaksanaan otonomi daerah itu dapat dikategorikan dalam dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah ini adalah :

- a. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah akan meningkat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam proses penentuan kebijakan dan pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi dan pengawasan akan semakin meningkat.
- c. Munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk mengembangkan pembangunannya.
- d. Meningkatkan gairah birokrasi pemerintah daerah, karena adanya keleluasaan untuk mengambil keputusan serta terbentuknya peluang karier yang lebih tinggi karena kompetisi profesional.
- e. Meningkatnya pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun DPRD, sehingga keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, terpercaya dan akuntabel yang didambakan masyarakat dapat terwujud.
- f. Meningkatkan peran DPRD sebagai wahana demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- g. Pemberian pelayanan umum kepada masyarakat semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas sejalan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang lebih baik yang pada gilirannya akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat.
- h. Munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagi pengembangan daerahnya dalam arti peningkatan akuntabilitas.

Sedangkan dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang dapat terlihat di lapangan, antara lain :

- a. Keinginan bagi daerah otonom untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berlebihan, yang dapat menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi, memberatkan masyarakat dan kurang terjaminnya kelestarian lingkungan (tidak transparan dan akuntabel).
- B. Munculnya konflik kepentingan antar daerah serta antara daerah dan Pusat yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam seperti sumber daya air, hutan, lingkungan hidup dan sebagainya serta terjadinya pengaturan daerah yang *over regulated* atau benturan

- peraturan daerah di tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Propinsi ataupun Pusat karena lemahnya sistem pengawasan.
- c. Antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota, daerah Propinsi dan Pusat biasa tidak terjadi integrasi dan sinergi, karena masing-masing merasa mempunyai kompetensi sendiri-sendiri yang dapat menimbulkan segmentasi antara daerah.
 - d. Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan yang mendorong/ menjurus kepada eksklusivisme daerah dan proteksivisme kedaerahan, sehingga dapat mengganggu kepada makna persatuan dan kesatuan bangsa.

Penutup

1. Simpulan

Secara substansial implikasi dari implementasi kebijakan otonomi daerah di Indonesia sejak diterapkannya UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah terjadinya perubahan penggunaan model penyelenggaraan pemerintahan, di mana model *structural efficiency model* yang menekankan nilai efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal telah ditinggalkan dengan menerapkan model *local democracy model* yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal, yang dimiliki daerah masing-masing. Dengan demikian, diperlukan suatu penataan pemerintahan daerah dengan menekankan pada aspek kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan (DPRD) dan manajemen urusan otonomi, agar pemerintahan daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah selama ini telah berimplikasi dalam penataan dan pengelolaan pemerintahan di daerah, baik yang berdampak positif maupun yang memberikan dampak negatif, yang dapat dilihat dari aspek : (1) Hubungan legislatif dan eksekutif; (2) Keuangan daerah; (3) Pengembangan dan pembinaan birokrasi lokal; (4) Dinamika politik lokal yang cenderung sangat tinggi; (5) Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan masyarakat. (6) Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan (7) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Saran

- a. Perlunya pihak masyarakat dan pemerintah daerah untuk meluruskan pemahaman yang keliru dalam mempersepsikan kebijakan otonomi daerah yang mengkaitkan semata-mata dengan uang. Otonomi diidentikkan dengan *otomoney* yang dapat menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi sehingga dapat memberatkan masyarakat.
- b. Diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat mencegah atau meminimalisir munculnya konflik kepentingan antar-daerah dan antara pusat dan daerah yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam.
- c. Diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk mencegah munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan, sehingga dapat mengganggu kepada makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik & Nur'ain Lubis, 2003. "Dampak Otonomi Daerah" dalam *Madani Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*: Vol. 1, No. 1, Juli. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dewantoro, Boedi. 2001. *Strategi Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Otonomi*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaho, J. Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kaloh, J., 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaukani, H, et.al. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.